



Implementasi Kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Dalam Mencegah Konflik Sosial Di Kota Surabaya

Diyah Nurmawati^{1✉}

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: diyahnurma567@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan komunikasi dengan pemerintah daerah. Penelitian ini menekankan pentingnya interaksi aktif antara anggota FKDM dan pejabat pemerintah untuk membangun jaringan yang kuat yang memfasilitasi pertukaran informasi penting mengenai potensi ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Keterlibatan ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat terhadap lingkungan dan keamanan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada dinamika komunikasi selama pertemuan FKDM. Penelitian ini melibatkan pengamatan interaksi antara anggota FKDM dan perwakilan pemerintah daerah, serta pengumpulan data tentang jenis informasi yang dibagikan mengenai ancaman masyarakat. Penelitian ini juga meneliti peran tokoh-tokoh kunci di FKDM, seperti Ketua dan Wakil Ketua, dalam mengoordinasikan kegiatan, mengumpulkan data, dan merumuskan rekomendasi kepada pemerintah. Metode ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang proses yang terlibat dalam diskusi keselamatan masyarakat dan efektivitas strategi komunikasi yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa FKDM memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dialog aktif selama pertemuan tidak hanya memungkinkan terjadinya pertukaran informasi tetapi juga mendorong partisipasi dari semua peserta, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih akurat dan komprehensif tentang isu-isu masyarakat. Studi ini menyoroti bahwa meskipun lingkungan tampak damai, ketegangan dan potensi konflik tetap ada, sehingga memerlukan tindakan proaktif untuk mengatasi tantangan ini. Hasil tersebut menggarisbawahi efektivitas FKDM dalam mendorong komunikasi dan kolaborasi terbuka, yang penting untuk menjaga keamanan dan keharmonisan masyarakat.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat*

Abstract

The main objective of this study was to explore the role of the Community Early Warning Forum (FKDM) in enhancing community engagement and communication with local government. This study emphasizes the importance of active interaction between FKDM members and government officials to build a strong network that facilitates the exchange of important information regarding potential threats to community safety. This engagement is essential to foster a sense of ownership and responsibility among community members towards their environment and safety. This study used a qualitative approach, focusing on the dynamics of communication during FKDM meetings. This study involved observing interactions between FKDM members and local government representatives, as well as collecting data on the types of information shared regarding community threats. This study also examined the roles of key figures in FKDM, such as the Chairperson and Vice Chairperson, in coordinating activities, collecting data, and formulating recommendations to the government. This method allows for a comprehensive understanding of the processes involved in community safety discussions and the effectiveness of the communication strategies used. The findings of the study indicate that FKDM plays a significant role in bridging the gap between the community and local government. Active dialogue during the meetings not only allowed for the exchange of information but also encouraged participation from all participants, resulting in a more accurate and comprehensive understanding of community issues. The study highlighted that despite the apparent peaceful environment, tensions and potential for conflict persist, necessitating proactive measures to address these challenges. The results underscore the effectiveness of FKDM in fostering open communication and collaboration, which are essential to maintaining community security and harmony.

Keywords: *Policy Implementation, Community Early Warning Forum*

PENDAHULUAN

Surabaya, sebagai ibu kota Jawa Timur merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik yang dinamis. Dengan populasi yang padat dan beragam, Surabaya menyimpan potensi konflik yang dapat muncul dari perbedaan kepentingan, latar belakang budaya, dan kondisi sosial yang beragam. Jumlah penduduk Kota Surabaya ditahun 2023 sebanyak 3.009.286 jiwa.

Tabel 1.1

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Surabaya

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (km2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Karang Pilang	75,6	0,43	2,51	8048	98
Jambangan	54,2	0,92	1,8	13220	98
Gayungan	44	0,25	1,46	7470	95
Wonocolo	80	0,19	2,66	12249	97
Tenggilis Mejoyo	59	0,31	1,96	10153	97
Gunung Anyar	61,6	1,05	2,05	6066	98
Rungkut	121,9	0,97	4,05	5323	97
Sukolilo	115,1	0,97	3,82	3818	97
Mulyorejo	87,6	0,32	2,91	5041	97
Gubeng	133,8	-0,38	4,45	16937	95
Wonokromo	155	-0,66	5,15	18765	96
Dukuh Pakis	59,5	-0,11	1,98	5802	98
Wiyung	75,4	0,95	2,5	6089	99
Lakarsantri	64,1	1,31	2,13	3390	100
Sambikerep	67,9	1,07	2,26	3957	99
Tandes	91,9	0,02	3,05	9248	97
Suko Manunggal	104,8	0,22	3,48	11304	99
Sawahan	199,3	-0,3	6,62	27763	98
Tegalsari	98,3	-0,15	3,27	22811	97
Genteng	58,7	0,12	1,95	14468	96
Tambaksari	227	0,16	7,54	25306	98
Kenjeran	181,3	1,26	6,02	21304	101
Bulak	47,1	1,15	1,56	7545	99
Simokerto	92,7	-0,52	3,08	35511	99
Semampir	182,4	-0,11	6,06	20151	100
Pabean Cantian	74,5	-0,29	2,48	13593	98
Bubutan	97,3	-0,38	3,23	25006	98
Krebangan	115,3	0,11	3,83	13409	99
Asemrowo	48	0,77	1,6	3191	102
Benowo	73,3	1,96	2,44	2752	100
Pakal	62,7	2,06	2,08	3377	101
Surabaya	3009,3	0,32	100	8958	98

(Sumber : <https://surabayakota.bps.go.id/id>) 2023

Dinamika sosial yang berkembang di Surabaya, seperti urbanisasi, migrasi, dan pergeseran ekonomi, sering kali memicu ketegangan antara berbagai kelompok masyarakat. Perbedaan kepentingan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dapat menjadi sumber konflik yang sulit dihindari. Melihat kondisi yang cukup damai tidak dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadinya konflik, bahkan terdapat konflik yang sifatnya tersembunyi atau latent conflict (Istiono, 2012). Contoh nyata dari potensi konflik yang dikutip pada kompas.com (Maya Citra Rosa, 2024) ini terlihat dalam insiden pengeroyokan yang melibatkan tiga remaja di Pabean Cantian, Surabaya. Dalam kejadian tersebut, para remaja tidak hanya dikeroyok, tetapi juga dipaksa untuk mengonsumsi minuman keras dan buah kecubung. Aksi kekerasan ini menunjukkan bagaimana perbedaan sosial dapat berujung pada perilaku agresif, serta bagaimana kelompok-kelompok tertentu dapat saling berkonflik. Hal ini mempertegas bahwa meskipun masyarakat dapat berfungsi dalam kondisi yang tampak tenang, ketegangan yang mendasar masih ada. Supaya dapat menjaga kondisi yang aman dan tentram maka diperlukan upaya untuk menangani konflik. (Hakim & Dewanti, 2020) mengatakan Jika konflik masih berada pada tahap latent, maka salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan pencegahan konflik (*conflict prevention*). Pencegahan konflik merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk penyelesaian konflik. Pencegahan konflik atau biasa dikenal dengan conflict prevention bertujuan untuk mencegah konflik agar tidak sampai pada tingkat *open conflict*. Dapat

disimpulkan pencegahan konflik merupakan langkah pertama agar tidak dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Dalam mencapai keberhasilan dalam pencegahan konflik maka dibentuklah Lembaga di masyarakat yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). FKDM dibentuk berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri No 46 Tahun 2019, Mempunyai tugas menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan (Kementerian Dalam Negeri, 2019). Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/133/436.1.2/2024 (Walikota Surabaya, 2024) tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Surabaya mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan konflik sosial di masyarakat. Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini dapat dipahami melalui teori hubungan masyarakat menurut Johnston dan Zawawi dalam (Puspa, 2014), yaitu yang menekankan pentingnya publik dalam membangun komunikasi yang efektif. Dalam konteks ini, publik bukan hanya sekadar kelompok masyarakat, tetapi sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan kepedulian yang sama terhadap isu-isu kewaspadaan dini. Forum Kewaspadaan Dini berperan dalam mengidentifikasi kepentingan spesifik dari publik yang terlibat, sehingga dapat menyusun strategi komunikasi yang tepat. Melalui proses sosialisasi, forum ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu yang dihadapi serta mengajak mereka untuk aktif berpartisipasi dalam mencari solusi.

Dengan menetapkan struktur keanggotaan yang jelas, forum ini diharapkan dapat berfungsi secara efektif dalam mengoordinasikan informasi dan data terkait potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mungkin terjadi, dan dengan dukungan anggaran yang memadai, pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih aman dan harmonis di Kota Surabaya. Keputusan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik, yang sejalan dengan visi pemerintah kota dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua warganya.

FKDM sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta mengedukasi masyarakat tentang cara-cara resolusi konflik yang damai. Sosialisasi FKDM di Surabaya menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan memperkuat modal sosial di kalangan warga, FKDM berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mengurangi ketegangan yang berpotensi menjadi konflik. Melalui sosialisasi ini, berbagai informasi dan pengetahuan mengenai pencegahan konflik sosial disampaikan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat lebih peka dan responsif terhadap isu-isu yang

dapat memicu ketegangan. Melalui praktik magang ini, penulis berkesempatan untuk mengamati dan terlibat dalam kegiatan sosialisasi FKDM yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol. Pengalaman ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi pencegahan konflik sosial dan pentingnya kewaspadaan dini dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Dengan demikian, laporan praktik magang ini akan membahas mengenai pelaksanaan sosialisasi FKDM oleh Bakesbangpol, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang diharapkan terhadap masyarakat Kota Surabaya dalam upaya mencegah konflik sosial. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan program serupa di masa depan.

LANDASAN TEORITIS

1. Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (Dalam (Retno Linangkung Indah, 2023), dengan empat fokus penelitian, yaitu fokus komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III karena kebijakan ini termasuk dalam rumpun kebijakan top-down dan juga untuk mengetahui kinerja dari para implementor atau pelaksana implementasi kebijakan.

2. Komunikasi Menurut Shannon & Weaver

Model komunikasi yang diusulkan oleh Shannon & Weaver berfokus pada akurasi penyampaian pesan. Model ini menggambarkan bagaimana sebuah sumber menyusun atau menyandi pesan dan mengirimkannya melalui suatu saluran kepada penerima, yang kemudian merekonstruksi pesan tersebut. Dalam esensinya, model Shannon & Weaver berasumsi bahwa sumber informasi memilih pesan yang akan dikomunikasikan dari kumpulan pesan yang memungkinkan. Teori ini menggaris bawahi pentingnya lima elemen utama yaitu pengirim, pesan, saluran, penerima, dan umpan balik (Muhammad Husni Tamrin, Lailul Mursyidah, Asih Widi Lestari, 2023).

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan obyek penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Surabaya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, dan studi dokumen. Sedangkan, prosedur analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Metode penelitian kualitatif ini akan membahas implementasi kebijakan sosialisasi forum kewaspadaan dini masyarakat dengan pendekatan yang mendalam dan komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut, serta memahami dinamika yang terjadi dalam proses sosialisasi.

Desain penelitian yang dipilih adalah kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan kontekstual. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Salah satunya adalah wawancara mendalam, yang akan dilakukan terhadap berbagai pihak terkait, seperti pengelola forum, anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan narasi langsung mengenai pengalaman mereka dalam mengikuti sosialisasi. Selain itu, observasi partisipatif juga akan dilakukan. Peneliti akan terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi, sehingga dapat mengamati interaksi dan proses yang terjadi secara real-time. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami lebih baik konteks sosial dan dinamika kelompok yang terlibat. Dokumentasi juga akan menjadi bagian penting dari pengumpulan data, di mana peneliti akan mengumpulkan berbagai dokumen terkait kebijakan, laporan kegiatan, dan materi sosialisasi yang digunakan.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan analisis tematik. Pertama, peneliti akan melakukan pengkodean awal untuk mengidentifikasi tema atau kategori dari data yang diperoleh. Setelah itu, tema-tema tersebut akan dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih besar, untuk memahami pola dan makna yang muncul dari data. Penting juga untuk menganalisis konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan, sehingga peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih holistik. Untuk memastikan validitas data, peneliti akan menerapkan triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam. Selain itu, member checking juga akan dilakukan, di mana peneliti akan mengonfirmasi temuan dengan informan untuk memastikan akurasi informasi yang diperoleh.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan sosialisasi forum kewaspadaan dini

masyarakat, serta dampaknya terhadap kesiapsiagaan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Dalam Mencegah Konflik Sosial di Kota Surabaya.

1. Pada Fokus Komunikasi

Dalam melakukan Sosialisasi FKDM, komunikasi dilihat sebagai tindakan yang Sosialisasi ini memiliki tujuan yang jelas yaitu memperkenalkan FKDM kepada masyarakat di Kecamatan yang ada di Surabaya. Dalam hal ini, komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mencakup persiapan, penyampaian, dan penerimaan pesan. Para peserta, termasuk Wakil Ketua FKDM, perwakilan dari pemerintah, dan anggota forum lainnya, berperan aktif dalam menyampaikan informasi penting mengenai FKDM. Mereka tidak hanya memberikan penjelasan mengenai struktur dan fungsi FKDM, tetapi juga menyampaikan harapan dan tujuan dari forum tersebut.

Tindakan komunikasi ini melibatkan penggunaan bahasa yang jelas dan tepat, serta penyampaian informasi yang relevan agar masyarakat dapat memahami peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan mengedepankan informasi yang komprehensif, para pembicara berusaha untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga mereka merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan mereka.

Selama FKDM berlangsung, setiap pembicara menyampaikan pesan yang dirancang untuk membangun kerjasama antara FKDM dan masyarakat. Ini mencerminkan bahwa komunikasi bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun hubungan yang positif dan saling mendukung. Dengan melakukan tindakan komunikasi yang efektif, FKDM berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kewaspadaan dini terhadap potensi ancaman.

Tindakan komunikasi juga mencakup respons dari audiens. Sebagai contoh, ketika masyarakat menerima informasi tentang FKDM, mereka diharapkan dapat memberikan umpan balik, baik berupa pertanyaan maupun saran, yang dapat memperkaya diskusi dan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan. Dengan demikian, komunikasi sebagai tindakan bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga tentang bagaimana pesan tersebut diterima dan diproses oleh audiens.

Secara keseluruhan, tindakan komunikasi yang berlangsung dalam sosialisasi FKDM menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses aktif yang melibatkan semua pihak. Melalui tindakan ini, FKDM tidak hanya memperkenalkan diri, tetapi juga membangun fondasi untuk kolaborasi yang lebih baik dalam upaya menjaga keamanan masyarakat. Setiap pihak yang terlibat harus berusaha untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang kondusif, di mana informasi dapat disampaikan dengan jelas dan diterima dengan baik, dengan demikian FKDM dapat berkontribusi secara optimal dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman, harmonis, dan berdaya, dimana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi positif.

Selama sosialisasi FKDM yang berlangsung, terjadi dialog aktif antara anggota FKDM dan pejabat kecamatan. Setiap peserta memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi, pandangan, dan pendapat mengenai potensi ancaman dan tantangan yang ada di daerah. Proses ini tidak hanya bersifat satu arah, di mana satu pihak saja yang berbicara, tetapi melibatkan semua pihak yang hadir untuk berkontribusi dalam diskusi.

Interaksi ini menciptakan atmosfer yang kondusif untuk komunikasi terbuka. Anggota FKDM, yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh agama, pemuda, dan tenaga pendidik, membawa perspektif yang berbeda-beda. Dengan saling bertukar informasi, mereka dapat memberikan input yang berharga dan mendukung satu sama lain dalam mengenali dan memahami isu-isu yang mempengaruhi keamanan di lingkungan mereka.

Diskusi mengenai potensi ancaman dan tantangan di daerah juga menunjukkan bahwa komunikasi dalam FKDM bersifat kolaboratif. Misalnya, ketika seorang anggota FKDM mengemukakan kekhawatiran mengenai situasi keamanan tertentu, anggota lainnya dapat memberikan masukan atau solusi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Ini menciptakan ruang untuk saling memahami, di mana setiap orang merasa dihargai dan didengarkan.

Melalui interaksi yang aktif ini, FKDM dapat membangun jaringan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Dialog yang terbuka memungkinkan anggota FKDM untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada pejabat kecamatan, yang kemudian dapat merespons dengan tindakan yang tepat. Keterlibatan semua pihak dalam proses komunikasi ini memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan.

2. Pada Fokus Sumberdaya

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah konflik sosial di kota Surabaya, sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia terdiri dari keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua RT/RW, anggota Tim Deteksi Dini, dan anggota FKDM yang sehari-harinya merupakan Bhabinkamtibmas, anggota kepolisian yang bertugas di tingkat kelurahan, tokoh organisasi, tokoh agama, tokoh pemuda, dan akademisi. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan sosialisasi FKDM akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk mencegah konflik sosial di kota Surabaya telah secara positif mendukung implementasi kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, bahwa faktor sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan mendukung implementasi atas suatu kebijakan tugasnya.

3. Pada Fokus Disposisi

Dari hasil penelitian, dalam implementasi kebijakan sosialisasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dalam mencegah konflik sosial di kota Surabaya pada fokus disposisi diketahui bahwa sikap anggota forum kewaspadaan dini masyarakat, responsif, bertanggung jawab, bersungguh-sungguh dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fokus disposisi anggota FKDM berupa sikap dan kesungguhannya telah secara positif mendukung implementasi kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, bahwa faktor disposisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan mendukung implementasi atas suatu kebijakan.

4. Pada Fokus Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Surabaya, struktur birokrasi yang digunakan mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara anggota forum. Berikut adalah struktur birokrasi FKDM yang relevan dengan kebijakan ini:

1) Ketua FKDM

Ketua FKDM berperan sebagai pengarah utama yang mengoordinasikan semua kegiatan forum. Tugasnya meliputi pengumpulan data dan informasi dari

masyarakat yang berkaitan dengan potensi ancaman, serta memberikan laporan dan rekomendasi kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Surabaya.

2) Wakil Ketua

Wakil Ketua mendukung Ketua dalam mengelola informasi yang masuk. Wakil ketua bertugas untuk mengkomunikasikan dan mengklarifikasi data yang disampaikan oleh masyarakat. Selain itu, Wakil Ketua juga membantu dalam penyusunan laporan dan rekomendasi.

3) Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan data. Tugasnya termasuk menginventarisasi informasi yang diterima dari masyarakat dan memastikan bahwa semua kegiatan FKDM tercatat dan terdokumentasi dengan baik.

4) Anggota Forum

Anggota FKDM berfungsi untuk menjaring dan menampung data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman. Mereka menjadi perwakilan suara masyarakat dalam forum, sehingga informasi yang diterima dapat lebih akurat dan komprehensif.

5. Tim Kewaspadaan Dini

Sebagai bagian dari struktur yang lebih luas, Tim Kewaspadaan Dini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang berkolaborasi dengan FKDM. Mereka bertugas untuk menindaklanjuti laporan dan rekomendasi yang diberikan oleh FKDM, serta melakukan analisis lebih lanjut terhadap potensi ancaman yang diidentifikasi.

Dengan struktur birokrasi yang jelas ini, FKDM Kota Surabaya dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Pembagian kerja yang sudah terdefinisi dengan baik memastikan bahwa setiap anggota memiliki peran yang spesifik dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan kewaspadaan dini di masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan pentingnya faktor struktur birokrasi dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kota Surabaya memiliki peranan yang signifikan dalam mencegah konflik sosial. Melalui struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir, FKDM mampu mengoordinasikan berbagai elemen masyarakat dalam upaya mendeteksi dan

menangani potensi ancaman secara efektif. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Forum berkontribusi dengan peran masing-masing, memastikan informasi tentang ancaman dan tantangan dapat dijangkau dan disampaikan secara akurat kepada pemerintah. Selain itu, sikap responsif dan kompeten dari anggota FKDM juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, L., & Dewanti, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration Journal*, 4(1), 69–82. <https://jakarta.bps.go.id/>
- Istiono. (2012). Optimalisasi Kewaspadaan Nasional Terhadap Konflik Sosial di Pedesaan Guna Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional. *LEMHANNAS RI*. <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000015/swf/1757/files/basic-html/page6.html>
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah*. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Maya Citra Rosa. (2024). *Kronologi 3 Remaja di Surabaya Dikeroyok, lalu Dicekoki Miras dan Kecubung*. <https://regional.kompas.com/read/2024/03/14/132402078/kronologi-3-remaja-di-surabaya-dikeroyok-lalu-dicekoki-miras-dan-kecubung>.
- Muhammad Husni Tamrin, Lailul Mursyidah, Asih Widi Lestari, A. S. (2023). *Komunikasi dan Advokasi Kebijakan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Puspa, R. (2014). Pengertian-pengertian Dasar Hubungan Masyarakat. *Modul Hubungan Masyarakat*, 2–7. <http://repository.ut.ac.id/4411/1/SKOM4103-M1.pdf>
- Retno Linangkung Indah, A. M. (2023). Implementasi Kebijakan E-Government Pada Pendaftaran Surat Pengantar Nikah Online di Kelurahan Wonokusumo Surabaya. *Jurnal Mahasiswa: Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 283.
- Walikota Surabaya. (2024). *Keputusan Walikota Surabaya*. https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf